



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 015/23012009
HARI : JUMAT
TANGGAL : 23 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
1.	Pengamat: Obama Belum Tentu Bantu Indonesia Keluar dari Krisis	3
2.	DK PBB Serukan Gencatan Senjata Permanen	3
3.	Indonesia vows to support free trade	4
4.	AS Tolak Resolusi WHO Tentang Palestina	5
5.	Obama Janjikan Perdamaian Abadi Di Timur Tengah	6
6.	China: Pelaku Susu Tercemar Melamin Dihukum Mati	7
II.	NASIONAL	
A.	POLITIK	
1.	Pilpres Putaran Pertama 8 Juli 2009	7
B.	EKONOMI	
1.	Indonesia Kurangi Ekspor Karet 20 Persen	9
2.	Ekspor Beras Premium Bulan Depan	9
3.	Penandatanganan Kontrak Proyek Gas	10
C.	SOSBUD	
1.	Pejambon Coffee, Diplomasi Wayang Ala Indonesia	10
2.	Kerja Sama Pendidikan RI-Turki Ditandatangani	12
D.	HANKAM	
1.	Pengusaha Malaysia Serobot Dua Kilometer Wilayah RI	13
E.	HUKUM	--
F.	OLAHRAGA	--

	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
	1.	WOC Manado Targetkan Deklarasi Kelautan	14
	2.	Jakarta 'most at risk' of climate change	14
	III.	ARTIKEL	
	1.	Indonesia, Malaysia need harmonized anti-timber smuggling procedures (by Eliswan Azly)	15
	2.	Regionalization versus globalization (by Osman Rzyttka)	17
	IV.	LAIN-LAIN	
			--
	V.	EDITORIAL	
	1.	Zimbabwe Semakin Runyam	18
	2.	Optimisme Investasi di Awang-Awang	18

Jakarta, 23 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Pengamat: Obama Belum Tentu Bantu Indonesia Keluar dari Krisis

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Mochtar Masoed mengatakan, meskipun masa kecil Presiden Amerika Serikat Obama pernah di Indonesia, namun hal itu tidak menjanjikan akan menguntungkan Indonesia.

Menurut dia, Obama menjalin hubungan dengan Indonesia tidak berdasarkan unsur keluarga, namun faktor politik yang menguntungkan bagi Amerika.

"Yang harus dilihat adalah bagaimana Obama merumuskan kebijakan yang akan dicapai dalam jangka pendek. Di samping agenda yang paling utama adalah menyelesaikan krisis finansial yang terjadi di Amerika dan dunia. Jika Indonesia dianggap merupakan bagian dari penyelesaian ekonomi, maka akan diuntungkan. Saya pikir itu yang perlu kita lihat sekarang ini," kata Mochtar Masoed di Yogyakarta, Rabu (21/1).

Mochtar juga menyangsikan pernyataan Obama tentang dukungannya terhadap Israel dan mendukung tindakannya agresi militer terhadap Palistina. Sebab kata-kata tersebut diucapkan di hadapan orang-orang yang punya pengaruh besar di New York, khususnya di Manhattan yang sebagian besar adalah orang-orang Yahudi.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR Hajriyanto Yassein Thohari mengatakan janji Presiden AS Barack Obama untuk memperbaiki hubungan dengan dunia Islam tidak akan mengubah prinsip hubungan luar negeri AS yang pro-Israel. "Obama adalah Obama. Dia adalah Presiden Amerika Serikat (AS) sebagaimana 43 presiden negara itu sebelumnya. AS adalah negara besar dan tua dengan sistem yang bukan hanya sudah sangat mapan, tetapi juga nyaris status quo dan secara sistemik dan kultural AS itu pro-Israel," kata Thohari.

Obama dalam pidato pelantikan sebagai Presiden ke-44 AS memberikan harapan hubungan luar negeri AS yang lebih baik terutama dengan dunia muslim.

"Dengan dunia muslim, kami akan usahakan jalan baru ke depan, berdasarkan pada kepentingan dan penghormatan bersama," kata Obama.

Sponsor Israel

Thohari yang juga anggota Komisi I DPR ini mengatakan bahwa bersama negara-negara Barat lainnya, Amerika Serikat juga merupakan sponsor utama berdirinya negara Israel pada akhir era imperialisme di dekade 40-an.

"Ini adalah fakta politik yang tak terbantahkan. Dan fakta politik inilah yang menjadikan AS dan Barat seringkali berhadapan muka dengan dunia Islam. Ada banyak ketegangan di antara keduanya," ujarnya.

Namun, ia mengakui, pidato Barack Obama memang menyebut dunia Islam meski tetap memosisikannya sebagai dunia lain di seberang sana.

"Dunia Islam bukan juxta position (berposisi sejajar) AS, tapi oposisi AS," ujarnya.

Karena itu, kata dia, dalam pidato Barack Obama itu, setelah secara normatif mengajukan ajakan kerja sama saling menghormati, Obama menutup kalimatnya tentang dunia Islam dengan mengancam sembari menggunakan kata tidak ramah, yaitu defeat.

Menurut Thohari, pandangan AS terhadap dunia Islam di bawah Barack Obama tidak akan berubah dan tetap akan diperlakukan sebagai oponent atau rival.

Tak heran, menurut dia, jika Barack Obama tidak menyinggung sama sekali soal Palestina-Israel. "Padahal soal inilah yang menjadi jantung persoalan dunia Islam dan Arab selama enam dekade ini. Soal inilah yang menguras semua hampir seluruh energi dunia Arab dan Islam," katanya. (Suara Karya)

2. DK PBB Serukan Gencatan Senjata Permanen

Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan gencatan senjata sementara yang diterapkan di Jalur Gaza dipermanenkan, Rabu, dengan jaminan pencegahan penyelundupan senjata dan seluruh jalur perbatasan dibuka kembali.

Sebanyak 15 anggota DK PBB sepakat untuk mendorong pernyataan yang disusun Inggris dan Prancis bahwa gencatan senjata sepihak yang dilakukan oleh Israel dan disambut Hamas dengan menghentikan serangan roket mereka perlu segera ditindaklanjuti.

Dewan menyampaikan keprihatinan mereka terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, di mana sekitar 1.300 orang tewas dan banyak gedung dan sarana jalan hancur, sehingga menyulitkan pasokan bantuan.

Dewan Keamanan menilai perlunya menerapkan secara penuh resolusi yang diadopsi DK PBB pada 8 Januari yang menyerukan "gencatan senjata dengan segera dan dihormati oleh semua pihak."

Sejauh ini Dewan Keamanan mengapresiasi apa yang dilakukan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang bekerja keras mendukung implementasi resolusi tersebut.

Di Jenewa, Komite Palang Merah Indonesia (ICRC) menilai anak-anak di Jalur Gaza menghadapi ancaman besar dari amunisi yang tidak meledak meskipun ada gencatan senjata. Itu menyusul tewasnya dua anak akibat ledakan.

ICRC menyatakan dalam satu pernyataan bahwa granat dan bom tidak meledak yang tersebar di sekeliling jalur pantai berpenduduk padat itu mencerminkan bahaya besar dan dapat menghambat bantuan yang banyak-dibutuhkan.

"Sebagian besar anak tinggal di rumah dalam tiga pekan terakhir karena tidak ada peredaan permusuhan," kata Imad Abow Hasirah dari ICRC.

"Sekarang pertempuran itu telah selesai dan mereka memberanikan diri keluar ke jalan lagi, tapi mereka menghadapi risiko akan tewas atau buntung karena sisa-sisa perang itu," katanya lagi.

Dua anak tewas akibat amunisi tak meledak sebelumnya di daerah Shaaf, dekat Jabaliya. "Fakta bahwa Jalur Gaza adalah salah satu daerah berpenduduk padat di dunia membuat masalah amunisi yang tak meledak bahkan menjadi lebih akut," kata Antoine Grand, kepala kantor ICRC di Jalur Gaza. (Suara Karya)

3. Indonesia vows to support free trade

Indonesia will remain committed to free trade and will avoid protectionism as it copes with fallout from the global financial crisis, the Foreign Minister says.

Delivering his annual foreign policy address in front of scores of foreign ambassadors Thursday, Hassan Wirajuda said Indonesia would "anticipate a global crisis that threatens to trigger a global economic recession — even depression with an appeal to free trade".

"Anticipating this [crisis], Indonesia appeals that we remain committed to free trade and will avoid protectionism.

"Indonesia will continue to strengthen its economic cooperation with traditional partners, while continuing to improve our ties with non-traditional markets, such as Russia, East European countries, Latin America and Africa," Hassan said.

The current financial crisis has brought fears that worldwide economies might tighten import regulations and tilt toward protectionism, moves many say would worsen the situation.

The failure of the Doha Development Agenda and the ensuing worry about protectionism will somehow provide an opportunity for cooperation and integration in the East Asia region, with ASEAN in the driving seat in those dynamical process," he said, referring to the 2001 World Trade Organization agenda to liberalize trade.

Indonesia is one of 10 member states of ASEAN, which recently enacted its first laws and aims to become a unified market by 2015.

Hassan's remarks came amid efforts by Indonesia's Finance Ministry to crack down on the smuggling of illegal products into the country, with a particular focus on increasing security at Jakarta's main port, Tanjung Priok.

Indonesia's economy rode out a financial meltdown that hit in the third quarter of last year to post a growth of 6.2 percent for the year, only slightly down from the forecast of 6.6 percent.

Hassan said April's general elections represented the opportunity for Indonesia to demonstrate its maturity by providing the chance for change through a democratic mechanism.

The legislative elections are scheduled for April 9, and the presidential election will be held in July, with a possible second round in September should the first round not produce a clear winner.

"We will ensure that our elections are free, fair, democratic and peaceful. Successful elections will certainly strengthen and further consolidate our democracy," he said.

Indonesia launched the Bali Democracy Forum last December as a medium for Asian countries to discuss effective ways to enforce democracy.

It has also hosted a number of interfaith and peace initiatives.

Hassan also highlighted the role of Indonesia as "a bridge and consensus builder" in the UN Security Council, especially in its role as a non-permanent membership from 2007 to 2008.

"Indonesia never failed to ensure that all members fully complied with fundamental principles, in particular, respect for national sovereignty and territorial integrity. Indonesia consistently rejected unilateral separatism as demonstrated in the cases of Kosovo and Southern Ossetia."

He praised Indonesia for successfully ending a human rights dispute with its former province Timor Leste without employing the assistance of an international tribunal, as well as its strides in combating terrorism, which prompted the United States last year to lift an eight-year-old travel warning against Indonesia. (The Jakarta Post)

4. AS Tolak Resolusi WHO Tentang Palestina

Amerika Serikat menolak Resolusi yang berjudul "Kondisi kesehatan yang amat menyedihkan di Palestina terutama Gaza," yang disponsori negara-negara OKI termasuk Indonesia.

Dalam sidang "Executive Board" WHO yang digelar sejak 19 hingga 27 Januari telah disahkan Resolusi yang berjudul "The Grave Health Situation in the Occupied Palestinian Territory, particularly in the Occupied Gaza Strip", demikian Sekretaris Pertama PTRI Jenewa, Acep Somantri kepada koresponden Antara London, Kamis.

Menurut Acep Somantri, resolusi disetujui melalui pemungutan suara dengan 28 suara mendukung termasuk Indonesia dan satu suara menolak yaitu Amerika Serikat. Empat negara abstain yaitu Malawi, Bahamas, Selandia Baru dan Samoa serta satu negara tidak hadir (El Salvador).

Disetujuinya Resolusi tersebut, tidak terlepas dari upaya Menkes bersama Delegasi RI menggalang dukungan negara-negara OKI dan desakan agar rancangan Resolusi segera disahkan.

Menkes RI telah mendesak Executive Board WHO mengambil tindakan segera untuk memulihkan kondisi kesehatan di Jalur Gaza, sebagaimana yang disampaikan di hadapan sidang Executive Board pada tanggal 20 Januari lalu.

Diingatkan oleh Menkes RI bahwa pengesahan rancangan Resolusi ini adalah semata-mata didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan keadilan bukan atas dasar politik, sektarian maupun keagamaan.

Menkes RI puas dengan disahkannya Resolusi tersebut, dan menegaskan bahwa Indonesia siap membantu WHO bagi pengiriman Misi Khusus Kesehatan ke Palestina dimaksud.

Bantuan Medis

Resolusi "The Grave Health Situation in the Occupied Palestinian Territory, particularly in the occupied Gaza Strip", pada pokoknya mendesak negara-negara di dunia untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, berupa tim medis, ambulans, obat-obatan dan perawatan medis serta akses bagi pelayanan kesehatan di Jalur Gaza.

Resolusi juga mendesak, agar Dirjen WHO segera mengirimkan Misi Khusus Kesehatan (Urgent Specialized Health Mission) ke Jalur Gaza untuk mempercepat akses bantuan kesehatan kepada rakyat Palestina.

Resolusi mendesak penarikan penuh pasukan militer Israel dari jalur Gaza secepatnya.

Resolusi juga mendesak untuk membuka blokade dan semua perbatasan bagi akses bantuan kemanusiaan ke wilayah jalur Gaza, termasuk koridor untuk menjamin pemberian pelayanan bantuan kesehatan dan makanan, jalur Tim Medis dan transfer para korban luka.

Resolusi menekankan pula untuk melarang serangan militer Israel terhadap sipil dan infrastruktur kesehatan Palestina.

Resolusi mendesak pula untuk memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina, agar rakyat Palestina dapat hidup dengan aman di tanah mereka, dan menjamin kebebasan bergerak serta memfasilitasi tugas tim medis, ambulans dan upaya tanggap darurat untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Resolusi mendesak bantuan bagi rekonstruksi infrastruktur kesehatan di jalur Gaza yang hancur karena serangan militer Israel, demikian Aceh Somantri. (Antara)

5. Obama Janjikan Perdamaian Abadi Di Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama berjanji akan mengupayakan "perdamaian abadi" di Timur Tengah (Timgeng) dalam pembicaraannya melalui telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, Rabu.

Juru Bicara Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeina, mengungkapkan, Obama menghubungi pemimpin Palestina itu sehari setelah dia mengucapkan sumpah jabatannya. Obama juga meyakinkan Abbas bahwa dia berniat bekerja sama dengannya sebagai rekan kerja untuk membangun perdamaian abadi di wilayah tersebut.

Di hari yang sama, Obama juga berbicara dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Secara singkat Olmert melaporkan situasi di Gaza dan mengatakan bahwa dia berharap serangan yang dilakukan oleh Israel dan didukung Mesir, Amerika Serikat serta Eropa itu bisa menghentikan pertikaian di Gaza dan mempertahankan gencatan senjata hingga di masa mendatang mereka bisa menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Obama mengatakan kepada Abbas bahwa telepon itu merupakan telepon pertamanya kepada pemimpin negara lain sejak dia menjadi presiden.

"Ini telepon pertama saya ke pemimpin negara lain dan saya melakukannya hanya beberapa jam setelah saya masuk ke kantor baru ini," kata Rudeina mengutip pembicaraan Obama kepada Abbas.

"Dia juga mengatakan akan segera mengirim semua bala bantuan untuk menciptakan perdamaian secepat mungkin," kata Rudeina.

Namun, Abbas menolak usul Obama untuk melepaskan Jerusalem dan meminta kota itu tidak dijadikan ibu kota Palestina. "Jelas permintaan itu ditolak. Seluruh dunia tahu bahwa kota suci Jerusalem sudah masuk wilayah Palestina sejak tahun 1967 dan kami tidak terima wilayah Palestina dikurangi apalagi mencopot Jerusalem untuk tidak lagi menjadi ibu kota negara Palestina," kata Abbas, seperti ditirukan Rudeina.

"Abbas juga mendesak Obama untuk segera menciptakan perdamaian berdasarkan resolusi internasional," kata Abu Rudeina menambahkan.

Obama dan Menlu Hillary Clinton sebelumnya berjanji akan segera mengatasi konflik Israel-Palestina setelah mereka dilantik. Meskipun demikian, beberapa asisten Abbas mengaku sangat takjub dengan gerak cepat yang dilakukan Obama.

"Kami tidak menyangka tindakan secepat ini dari Presiden Obama. Kini kami tahu bahwa dia memang serius untuk menyelesaikan masalah Palestina. Telepon itu juga seolah mengirimkan pesan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan rakyat Palestina adalah tanggung jawab Presiden Abbas," kata Rudeina lagi.

Dia menambahkan, "Telepon Obama juga menunjukkan tingkat keseriusan Amerika dan kami berharap bisa melihat perkembangan yang lebih baik di masa depan. Pesan yang disampaikan Obama setelah serangan Israel yang membabi-buta di Jalur Gaza adalah bahwa sang presiden memahami benar bahwa satu-satunya jalan keluar dari tragedi ini adalah perjanjian politik yang menjamin hak-hak asal rakyat Palestina."

Dia juga menyebutkan serangan 22 hari Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina, termasuk di antaranya 400 anak-anak.

Dalam pidato pertamanya, Obama juga menyatakan akan menjalin hubungan dengan negara-negara Muslim. "Kepada negara-negara Muslim, kami mengupayakan hubungan cara baru di masa mendatang dengan berdasarkan sikap saling menghargai untuk kepentingan bersama," katanya.

Sementara di kota Gaza, Hamas menghakimi sikap Obama. "Kami akan menghakimi Obama atas kebijakan dan sikapnya di wilayah ini. Kami telah belajar dari kesalahan presiden Amerika

sebelumnya, terutama George Bush, dan kejahatan serta kebijakannya yang tidak adil," kata Juru Bicara Hamas Fawzi Barhum.

Hamas berharap Obama "menghargai keinginan rakyat Palestina, mendukung hak asasi mereka atas wilayah mereka dan hak mereka untuk membela diri jauh dari tekanan dan kejahatan Israel."

Di hari pertamanya sebagai presiden, Obama telah melakukan hubungan langsung dengan pemimpin Timur Tengah. Namun, menurut sumber Gedung Putih, selain menghubungi Abbas dan Olmert, Obama juga menghubungi Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Raja Jordania Abdullah II.

Di Damaskus, Presiden Suriah Bashar Al-Assad menyampaikan harapan bagi "dialog konstruktif dengan Amerika Serikat berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati", selama masa jabatan Presiden Barack Obama.

Menurut laporan kantor berita resmi Suriah, SANA, Bashar mengatakan, dialog dapat membawa perdamaian yang adil dan menyeluruh di wilayah tersebut berdasarkan resolusi PBB.

Presiden Suriah itu mengucapkan selamat kepada Obama karena "memangku jabatan dan keberhasilannya dalam mengumandangkan kebijakannya yang menegaskan keinginan untuk mewujudkan perdamaian di seluruh dunia dan meletakkan harapan dan bukan ketakutan sebagai dasar bagi pendekatan politik."

Selama bertahun-tahun masa jabatan mantan Presiden AS George W Bush, Suriah menyandang sebutan "negara merah" dan menghadapi sanksi ekonomi serta pengucilan yang terus berlangsung oleh AS.

Di Beijing, pemerintah China mengharapkan kebijakan luar negeri pemerintahan Obama mampu menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Dan, China siap melakukan kerja sama.

"China ingin Amerika Serikat memperkuat hubungan dengan negara lain di dunia dan berharap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Obama menjaga perdamaian dunia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Jiang Yu dalam keterangan pers berkala, di Beijing, Kamis.

Menurut dia, China menginginkan AS mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas dan China siap meningkatkan hubungan lebih baik dengan negara itu.

Terkait dengan kondisi hak asasi manusia (HAM) di China, dia mengatakan, pemerintah China telah melakukan perbaikan dan peningkatan soal HAM dan hal itu tidak perlu dikhawatirkan oleh negara lain. "China sangat menghormati HAM dan kemajuan HAM di China telah mengalami perkembangan cukup pesat," kata Jiang Yu.

China sendiri, katanya, bersama-sama negara lain ikut mempromosikan perbaikan dan peningkatan HAM dan secara aktif ikut dalam berbagai pertemuan internasional.

Dia mengatakan, China telah bekerja keras untuk memperbaiki HAM di dalam negeri dan upaya kerja sama dengan pihak internasional tetap terbuka. (Suara Karya)

6. China: Pelaku Susu Tercemar Melamin Dihukum Mati

Pengadilan China, Kamis (22/1), menetapkan hukuman mati terhadap dua tersangka atas peran mereka dalam skandal susu tercemar melamin sepanjang tahun lalu. Adapun pemimpin tertinggi Grup Sanlu, Tian Wenhua, dijatuhi hukuman seumur hidup.

Selain enam anak balita meninggal dunia, tercatat 300.000 anak balita mengalami gagal ginjal setelah meminum susu yang tercemari melamin. Bahan baku industri beracun ini lolos dari uji kualitas produk pangan.

Skandal susu tercemar ini telah merusak citra produk "buatan China" di seluruh dunia. Kasus ini telah menimbulkan kemarahan publik terhadap pemerintah.

Manajemen Sanlu, perusahaan produsen susu tercemar, mengetahui adanya masalah melamin itu pada awal Agustus 2008. Namun, kasus ini disembunyikan dari umum hingga pertengahan September karena Beijing menjadi tuan rumah penyelenggara Olimpiade.

Otoritas China tampaknya sengaja menyampaikan vonis atas para pelaku susu tercemar ini pada hari Kamis—sebelum datangnya Tahun Baru China pekan depan—untuk menenangkan masyarakat yang marah. Sejumlah sanak keluarga korban susu tercemar sampai menggugat pemerintah karena ganti rugi yang tidak memadai.

Persidangan para tersangka pelaku susu tercemar ini mendapatkan perhatian luas. Para tersangka ini adalah pemimpin tertinggi dan menengah perusahaan susu Grup Sanlu.

Banyak warga China dari kota industri Shijiazhuang rela menunggu beberapa jam di tengah suhu udara yang dingin untuk mendengarkan vonis atas para pelaku yang membuat anak-anak mereka menderita.

"Pesta Tahun Baru akan datang, tetapi kebahagiaan seperti apa yang bisa kami dapatkan?" ungkap Hou Rongbo, yang putranya meninggal dunia awal Januari 2008, hanya seminggu sebelum ulang tahun pertama.

Hou meyakini kematian putranya akibat leukemia yang disebabkan atau diperparah oleh susu tercemar melamin yang diminum putranya.

Banyak sanak keluarga korban terlihat marah dan kecewa setelah mengetahui pemimpin Grup Sanlu, Tian Wenhua, hanya dijatuhi hukuman seumur hidup. (Kompas)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Pilpres Putaran Pertama 8 Juli 2009

Setelah banyak dikritik karena lamban dalam menetapkan jadwal Pemilihan Presiden 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (22/1), akhirnya mengumumkan jadwal pemilihan presiden (pilpres) putaran pertama pada 8 Juli 2009 dan putaran kedua berlangsung pada 8 September 2009.

Hal itu disampaikan anggota KPU Abdul Aziz, di Jakarta, Kamis, usai rapat konsultasi KPU yang memutuskan jadwal Pilpres 2009 yang telah definitif.

Dalam menetapkan jadwal pilpres, menurut Abdul Aziz, KPU mempertimbangkan beberapa poin, di antaranya mengenai pelaksanaan tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, verifikasi, kampanye, dan pengadaan logistik.

"Logistik pilpres putaran pertama prosesnya bisa dimulai sebelum penetapan capres. Yang berat memang untuk (logistik) putaran kedua," katanya.

Ditemui terpisah, anggota KPU Andi Nurpati mengatakan, rapat pleno KPU telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif dalam menetapkan jadwal pilpres sehingga putaran pertama dapat dilaksanakan di awal Juli 2009.

KPU sepakat untuk menjadikan penetapan hasil pemilu legislatif yang diumumkan pada 9 Mei 2009 sebagai dasar untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oleh partai yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, saat menyusun jadwal pilpres, KPU mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota KPU berulang kali melakukan koordinasi dengan hakim MK dan meminta agar waktu penyelesaian sengketa dipercepat.

Namun, kemudian rapat pleno KPU memutuskan untuk tidak menunggu hasil sengketa pemilu legislatif di MK. Landasan KPU untuk menerima pendaftaran calon presiden dan wakil presiden adalah hasil pemilu legislatif yang ditetapkan oleh KPU pada 9 Mei 2009.

Andi mengungkapkan, jika pilpres dilaksanakan awal Juli 2009 maka waktu penyiapan logistik masih mencukupi. Panitia pengadaan dapat memulai lelang sejak April 2009.

"Tetapi, khusus surat suara tidak bisa dicetak dulu kalau belum ada calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat," katanya.

Sementara itu, mantan anggota KPU Anas Urbaningrum berharap, KPU benar-benar menepati jadwal pilpres yang telah diumumkan dan jangan diubah lagi sehingga tidak membingungkan masyarakat pemilih dan parpol peserta pemilu.

"KPU kan yang berwenang menetapkan jadwal dan tahapan pilpres. Kalau sudah diumumkan jadwalnya, jangan lagi KPU bimbang dan malah mengundang partai politik (parpol) untuk membicarakan kembali jadwal pilpres," ujar mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Menurut Anas, KPU sudah terlalu lama membiarkan masyarakat pemilih dan partai politik peserta Pemilu 2009 dengan terus mengulur-ulur jadwal pilpres.

"Masyarakat pemilih, parpol peserta pemilu, termasuk capres-capres, membutuhkan jadwal waktu pilpres yang definitif karena mereka perlu mempersiapkannya jauh-jauh hari," ujarnya.

Anas Urbaningrum menambahkan, tidak ada urgensinya lagi bagi KPU untuk mengundang parpol atau MK dalam menetapkan jadwal pilpres.

"Yang penting, KPU harus mengantisipasi bahwa jadwal pilpres kemungkinan bisa berlangsung dalam dua putaran," ujarnya.

Anas Urbaningrum juga mengingatkan, masa jabatan presiden sekarang berakhir pada 20 Oktober 2009. "Karena itu, pada tanggal 20 Oktober 2009 sudah harus berlangsung pelantikan presiden baru," katanya tandas.

Anas menambahkan, sebelum itu, yakni sekitar 14 hari, presiden dan wakil presiden terpilih sudah harus ditetapkan oleh KPU.

"Secara konstitusional, batas tanggal 20 Oktober 2009 tidak boleh dilewati. Jika dilewati, maka terjadi apa yang pernah saya katakan sebagai `kegawatan konstitusional`, yakni vacuum of power," ujarnya. (Suara Karya)

B. EKONOMI

:

1. Indonesia Kurangi Ekspor Karet 20 Persen

Indonesia sebagai negara penghasil karet terbesar kedua di dunia menurunkan ekspornya 20% untuk mengangkat harga karet alam yang belakangan ini terus merosot.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gabkindo) Alex K Eddy saat berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (22/1), mengatakan saat ini harga karet terus anjlok menyusul krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS).

"Harga karet yang murah akan memukul perkembangan karet Indonesia, khususnya petani karet, karena itu Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tepat untuk memperbaiki harga karet alam di pasar dunia tersebut," katanya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi volume ekspor hingga 20% sehingga nantinya konsumen di luar negeri bisa membeli dengan harga yang lebih baik.

"Langkah yang diambil Indonesia itu sebelumnya harus didialogkan dulu dengan dua negara produsen karet besar dunia lainnya, yakni Thailand dan Malaysia, dan sepakat sama-sama menurunkan ekspor hingga 20%.

Ekspor karet Indonesia mencapai 2,4 juta ton per tahun, sebagian besar atau 70 persen tujuan pabrikan ban kendaraan bermotor di Amerika Serikat.

Menurut Alex, jika langkah penurunan ekspor karet tersebut masih tidak bisa membantu mengangkat harga karet alam dunia, maka tiga negara produsen ini harus berdialog lagi mencari langkah strategis untuk mengangkat harga karet.

Mengenai prospek karet di Indonesia, ia mengatakan komoditi karet punya prospek baik ke depan, karena bagaimana pun ketergantungan masyarakat dunia terhadap karet tetap tinggi.

Melihat prospek ke depan, kata dia, tidak ada salahnya bila pengembangan karet terus dilakukan, apalagi Indonesia memiliki lahan yang ideal untuk tanaman karet dibandingkan negara lain.

Ia menganjurkan para petani dan masyarakat luas untuk terus mengembangkan perkebunan karet sehingga bisa mengalahkan Thailand sebagai produsen terbesar karet dunia.

Sebenarnya, kata Alex, dari segi lahan masih luas di Indonesia, hanya saja jumlah produksi karet Thailand lebih tinggi karena proses penanaman karetnya lebih baik.

Produksi karet di Thailand setiap hektare bisa mencapai 2,5 ton, sementara di Indonesia hanya sekitar satu ton. Karena itu untuk mengejar produksi, teknologi dan proses penanaman karet harus lebih baik lagi dibandingkan sekarang. (Media Indonesia)

2. Ekspor Beras Premium Bulan Depan

Jakarta-Rencana ekspor beras kualitas premium ditargetkan terealisasi pada bulan Februari mendatang. Sementara itu, volume ekspor beras pada 2009 direncanakan maksimum sebanyak

satu juta ton. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan) Sutarto Alimuso menyatakan hal itu ketika dihubungi SH, Rabu (21/1).

Ia mengatakan jenis beras yang akan diekspor tergantung dari permintaan pasar, namun akan diprioritaskan yang berkualitas premium supaya petani dapat menikmati keuntungan. Sutarto mencontohkan, beras premium dan pulen misalnya varietas Cisadane dan Rojolele.

Menurut Sutarto, bila target produksi padi tahun 2009 sebanyak 63,5 juta ton gabah kering giling (GKG) tercapai, surplus beras pada tahun ini mencapai 3,8 juta ton. Jika digabungkan dengan stok tahun lalu yaitu 2,34 juta ton, surplus selama dua tahun terakhir akan mencapai lebih dari enam juta ton.

Ia menambahkan stok beras yang aman jika tersedia untuk jangka waktu enam bulan atau lebih dari 15 juta ton beras. Stok tersebut, kata Sutarto, tidak semua berasal dari pemerintah, melainkan ada yang di Perum Bulog, masyarakat, bahkan ada yang masih di tanam.

Tidak Impor

Dirut Bulog Mustafa Abubakar menampik jika kebijakan untuk tidak mengimpor beras pada tahun 2008 dan 2009 adalah kebijakan politis, utamanya menjelang pemilu.

"Saya tekankan, itu bukan kebijakan politis, tapi realitasnya seperti itu. Kita tahu persis, Bulog-lah yang punya wewenang masalah impor ini," tegas Mustafa ketika berbicara dalam Seminar Nasional dan Temu Pakar Revitalisasi dan Peran Bulog di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM, Rabu (21/1).

Menurut Mustafa, Indonesia saat ini sudah mampu melakukan swasembada beras sehingga tidak lagi perlu melakukan impor. (Sinar Harapan)

3. Penandatanganan Kontrak Proyek Gas

Sebanyak 14 kontrak proyek gas senilai 6,763 miliar dolar AS atau Rp 76 triliun ditandatangani dalam acara penutupan konferensi dan pameran internasional Indonesia Gas (Indogas) 2009 Ke-4 di Jakarta, Kamis (22/1). Penandatanganan kontrak yang disaksikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tersebut meliputi 7 kontrak jual beli gas bumi, 4 kontrak jual beli gas elpiji, 1 kontrak pembangunan kilang elpiji, dan 2 kontrak jual beli gas Senoro, Sulawesi Tengah. Purnomo mengatakan, proyek-proyek gas ini akan menggerakkan perekonomian nasional. "Proyek ini akan menyerap sekitar 2.100 tenaga kerja," ujarnya.

Ke-7 kontrak penjualan gas bumi tersebut terdiri dari memorandum of agreement (MoA) antara PT Pupuk Kaltim (PKT) dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) East Kalimantan, yakni Total E&P Indonesia, Virginia Indonesia Co Llc, Chevron Rapak Ltd, Chevron Ganal Ltd, Chevron Makassar Ltd, ENI Muara Bakau BV. (Suara Karya)

C. SOSBUD

:

1. Pejambon Coffee, Diplomasi Wayang Ala Indonesia

"Tapi, di kehidupan di dunia nyata ini, terkadang kita tidak dapat melakukan semua hal."

Kata-kata itu meluncur dari bibir Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam acara Pernyataan Tahunan Menlu RI di Gedung Deplu kompleks Pejambon, Jakarta, Kamis petang.

Menlu bukan sedang mengeluh ketika mengucapkan kata-kata itu, ia hanya sedang berusaha menerangkan fakta mengenai riuhnya diplomasi di kehidupan nyata kepada kelompok punakawan Bagong, Gareng dan Petruk.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pernyataan Tahunan Menlu kali ini dikemas dalam sebuah pagelaran wayang kulit dalam bahasa Inggris yang dipentaskan oleh Kelompok Wayang Sena Wangi.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 170 undangan yang terdiri dari para duta besar dan para diplomat negara-negara sahabat, tokoh nasional dan para pejabat Deplu itu tokoh Bagong yang dibawakan oleh dalang Ki Bagong Darmono mengajukan satu pertanyaan kepada Menlu.

"How Indonesia should deal with the current global situation?" tanya Bagong dengan didampingi oleh kedua saudaranya Petruk dan Gareng dengan logat Jawa yang samar sehingga memancing tawa para undangan.

Menlu yang menyaksikan pertunjukan wayang bertajuk Duta Perdamaian itu dengan didampingi oleh sekitar 60 duta besar negara sahabat tersenyum ketika mendengar pertanyaan yang sekalipun diklaim sederhana oleh sang dalang namun membutuhkan jawaban yang tidak sederhana mengingat dunia saat ini dihadapkan pada krisis pangan, energi, keuangan global, ancaman pemanasan global dan konflik berkepanjangan di sejumlah negara.

"Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan perdamaian dunia namun dunia nyata berbeda dengan di dunia wayang, dimana dalang memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang menang dan kalah," jelas Hassan kemudian yang petang itu mengenakan baju tradisional Jawa berupa beskap hitam lengkap dengan penutup kepalanya.

Sekalipun terdengar ironis namun kata-kata Menlu itu boleh jadi benar adanya. Apalagi apabila dikaitkan dengan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Tahun 2009 baru bergulir 22 hari namun sudah lebih dari 1.000 warga sipil Palestina meregang nyawa akibat agresi militer Israel di wilayah yang dikendalikan Hamas tersebut.

Dan sekalipun masyarakat internasional, termasuk Indonesia, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan krisis kemanusiaan itu tapi tampaknya tidak terlalu banyak mendapatkan respon berarti dari pihak Israel.

Bahkan resolusi No.1860 yang diadopsi dengan susah payah oleh Dewan Keamanan PBB pun tampaknya masih diabaikan oleh Israel sehingga dibawah inisiatif Indonesia Majelis Umum PBB harus menggelar sidang darurat yang ironisnya mengadopsi suatu resolusi yang dinilai lunak oleh Indonesia.

"Dunia nyata penuh dengan berbagai ketidakpastian, ... sebagaimana kemalangan yang menimpa rakyat Gaza," ujar Menlu.

Dalam paparannya, Menlu mengatakan bahwa sebagaimana dalam babak pertama pementasan wayang tersebut dapat diambil pelajaran bahwa peperangan antara kebaikan dan kejahatan tidak menghasilkan apa-apa kecuali penderitaan bagi orang banyak sebagaimana yang terjadi di Gaza.

"Dunia saat ini menyaksikan bahwa pihak yang kuat dapat menghancurkan apapun yang mereka inginkan tanpa menanggung konsekuensi dan seluruh dunia hanya menjadi penonton," katanya merujuk fakta bagaimana sebagian besar warga dunia dapat menikmati peristiwa pembunuhan massal itu dari ruang tamu atau kamar tidur pribadi akibat kecanggihan teknologi televisi.

Pementasan wayang yang berlangsung lebih kurang 1,5 jam itu terbagi dalam dua babak, di babak pertama terjadi "goro-goro" dimana kebaikan berada diambang kehancuran sedangkan babak kedua dibuka dengan penampilan wayang orang yang membawakan sendratari mengenai perang antara kebaikan dan kejahatan.

Secara keseluruhan alur cerita pertunjukan wayang tersebut adalah peperangan antara kebaikan yang diwakili oleh kerajaan Amarta --tempat para Pendawa-- dengan kejahatan yang disimbolkan oleh kerajaan Giribraja.

Alkisah Raja Giribraja berambisi menyatukan 100 negara tetangganya dibawah kekuasaannya. Ia berhasil menyatukan 97 negara kecuali Amarta, Dwarawati dan Mandura.

Ditemui se usai pertunjukan, Menlu mengatakan adalah idenya untuk menggabungkan diplomasi dengan budaya guna menyampaikan pesan perdamaian.

Menurut dia, selain untuk menampilkan kesenian khas Indonesia yaitu kisah dalam wayang memiliki kedekatan dengan kehidupan nyata.

"Ada banyak pesan dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu kita lakukan hanya mengidentifikasi dan menangkap pesannya," ujarnya.

Khusus untuk memeriahkan acara tersebut seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Deplu memang mengenakan pakaian tradisional Jawa itu dalam berbagai warna, tidak terkecuali para staf penerima tamu.

Bagi sebagian besar orang Indonesia, busana tradisional biasanya hanya dikenakan dalam waktu-waktu yang khusus sehingga wajar jika sejumlah besar pejabat Deplu tampak sedikit kerepotan dengan busananya.

"Setelah 23 tahun, ini adalah kali kedua saya pakai beskap. Saya pertama kali memakainya sewaktu menikah," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Teguh Wardoyo mengenai beskap coklat yang dikenakannya.

Sementara itu karena pertunjukan wayang ditampilkan dalam bahasa Inggris dengan pesinden Elisabeth --warga negara AS-- yang mahir bahasa Jawa maka jalannya cerita dalam dipahami sepenuhnya oleh para duta besar negara sahabat.

Sebagian besar dari mereka mengikuti jalannya pertunjukan dengan antusias, beberapa bahkan memilih berdiri dari kursinya agar dapat melihat kemahiran sang dalang memainkan wayangnya dengan lebih jelas.

Adegan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang ditampilkan melalui sendratari pertempuran Pangeran Arjuna dengan para raksasa tampaknya juga menjadi adegan favorit karena diiringi musik yang lebih cepat.

"Sederhana karena hanya dua dimensi tapi sangat bagus dan impresif, sangat menarik dan cantik," kata Duta Besar Jepang ketika diminta pendapatnya mengenai pertunjukan itu.

Ia merupakan satu dan sejumlah duta besar yang mengikuti jalannya pertunjukan dengan serius.

Ditemui dalam acara ramah tamah yang menyediakan aneka panganan khas Indonesia, termasuk kelezatan kopi Indonesia itu, ia mengaku memahami pesan yang coba disampaikan sang dalang.

"Sangat bagus bagaimana pesan dapat sampai melalui budaya," katanya.

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Menlu jika sang dalang memiliki otoritas penuh dalam suatu pagelaran, di akhir cerita kebaikan sudah pasti berhasil mengalahkan kejahatan.

Amarta dengan para ksatrianya berhasil menundukkan Giribraja dan mewujudkan perdamaian. Sementara itu perdamaian di Gaza entah kapan baru akan terwujud, sekalipun Presiden AS Barack Hussein Obama yang diharapkan dapat membawa perubahan telah dilantik pada 20 Januari 2009.(ANTARA)

2. Kerja Sama Pendidikan RI-Turki Ditandatangani

PEMERINTAH Turki berjanji akan meningkatkan jumlah beasiswa hingga 300 persen kepada mahasiswa asal Indonesia untuk belajar di negara itu. Jika pada tahun-tahun sebelumnya beasiswa hanya diberikan kepada lima mahasiswa per tahun, terhitung mulai 2009 jumlahnya ditingkatkan menjadi 20 orang per tahun.

"Peluang beasiswa tersebut kami berikan bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Turki," kata Menteri Pendidikan Republik Turki Husyin Celik usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, kemarin.

Untuk memudahkan para mahasiswa asal Indonesia mendapatkan beasiswa, pemerintah Turki berencana menghilangkan syarat keharusan menguasai bahasa Turki bagi calon mahasiswa. Selama ini syarat tersebut terbukti menyulitkan mahasiswa asing yang berminat belajar di Turki.

Menurut Celik, selain mengundang mahasiswa asal Indonesia, pemerintah Turki juga berencana mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. "Sebelum 2006, Turki hanya mengirimkan 20-40 mahasiswa untuk kuliah S-2 dan S-3 di luar negeri. Setelah 2006 jumlahnya naik lebih dari 1.000 mahasiswa. Kami akan mempertimbangkan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan belajar," kata Celik.

Dalam kesempatan itu, Mendiknas mengatakan, perjanjian kesepahaman ini dilakukan agar semua kerja sama pendidikan antardua negara memiliki payung hukum yang jelas. Antara lain: pertukaran informasi di bidang pendidikan; pertukaran dosen, guru, mahasiswa, dan siswa; pertukaran tenaga ahli; kerja sama di tingkat perguruan tinggi dan politeknik; pengembangan kompetensi manajemen guru, dosen, dan kepala sekolah; serta beasiswa.

"Ada juga penyetaraan gelar pendidikan di Indonesia dan Turki. Ke depan, gelar di Turki diakui dan bisa digunakan di Indonesia, dan sebaliknya," kata Mendiknas.

Indonesia juga memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa asal Turki dan negara asing lain untuk belajar di Indonesia. "Kami mengundang 500 mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia," kata Mendiknas pula. (Jurnal Nasional)

D. HANKAM

:

1. Pengusaha Malaysia Serobot Dua Kilometer Wilayah RI

Pengusaha perkebunan kelapa sawit di Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia telah menyerobot wilayah darat Republik Indonesia (RI) di areal Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Pengusaha itu menyerobot wilayah selebar dua kilometer, dari patok tapal batas di Gunung Muba, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

TNBK seluas 800.000 hektare ini berlokasi di daerah hulu Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sebagian besar TNBK berbatasan dengan Suaka Alam Lanjak-Entimau, Sarawak, dan sebagian lagi di sektor timur dan barat berbatasan dengan areal Malaysia yang status lahannya bisa digarap untuk perkebunan.

Kepala Penerangan Komando Resort Militer 121/Alam Bhana Wanawai Kapten (Inf) Umar Affandi kepada SH, Rabu (21/1), menjelaskan, Danrem 121/ABW Kol (Inf) Nukman Kasodi dan Kapolda Kalbar Brigjen Pol R Nata Kesuma tengah melakukan peninjauan ke lapangan dengan pesawat helikopter.

Kepala Balai TNBK, Lutfi, mengaku, belum tahu persis lokasi yang diserobot, karena temuan TNI dan Polri perkembangan terbaru. Kabid Perlindungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Soenarno, menilai, dari sisi geografis agak aneh kalau lokasi dimaksud, termasuk di areal Malaysia, dijadikan perkebunan kelapa sawit, karena kontur tanahnya berbukit-bukit.

"Ini hanya kamulflase Malaysia untuk memuluskan praktik pencurian kayu. Tiga tahun lalu ditemukan 35 kilometer jalan berseliweran di areal TNBK yang dibangun secara ilegal oleh pihak Malaysia, demi kepentingan memuluskan pencurian kayu. Pemerintah pusat mestinya segera bersikap tegas. Ini masalah serius, karena menyangkut kedaulatan negara," ujar Soenarno.

Terisolasi

Menurut Umar, aksi penyerobotan sudah dilaporkan Danrem 121/ABW kepada Pangdam VI/Tanjungpura Mayjen TNI Tono Suratman di Balikpapan, Kalimantan Timur, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI-AD), Mabes TNI, dan Departemen Pertahanan.

Umar menjelaskan lokasi lahan Indonesia yang diserobot sangat terisolasi. Lokasi ini hanya bisa dijangkau dengan perahu cepat (speedboat) dari Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, menelusuri Sungai Sibau atau Sungai Mendalam, sebagai anakan Sungai Kapuas, sekitar satu minggu. Bila ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalur setapak dari Putussibau, membutuhkan rentang waktu 18 hari!

"Penyelesaian melalui jalur diplomatik dengan Federasi Malaysia, merupakan kewenangan Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri. Lokasi yang diserobot tidak termasuk di dalam 10 titik patok batas yang belum disepakati kedua negara," ujar Umar sebelum menyusul rombongan Danrem 121/ABW dan Kapolda Kalbar ke Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu.

Umar belum bisa menjelaskan lebih terperinci titik nomor patok batas dan titik koordinat wilayah darat Indonesia yang diserobot, karena masih menunggu laporan lengkap dari Komando Distrik Militer (Kodim) Putussibau.

Umar menuturkan terungkapnya praktik penyerobotan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit Malaysia itu berdasarkan laporan masyarakat. Saat ini kegiatan pembukaan lahan sudah dihentikan aparat yang berwenang di Kabupaten Kapuas Hulu. Sejumlah titik patok batas, kini tengah dicari, karena ada kemungkinan hilang atau dicabut.

Sepanjang perbatasan Provinsi Kalimantan Timur-Negara Bagian Sabah dan Provinsi Kalimantan Barat-Negara Bagian Sarawak, ada 19.328 titik patok yang sudah dipasang. Tujuh di antaranya patok tipe A, masing-masing berjarak 300 km, tipe B berjarak 50 km ada 76 buah, tipe C berjarak 5 km ada 535 buah, dan tipe D berjarak 25-200 meter ada 18.710 buah.

"Selama ini pemahaman masyarakat terhadap patok batas memang sangat minim, karena kurang sosialisasi. Kami tidak ingin lagi ada wilayah Indonesia di perbatasan bermasalah, lantaran patok batas tidak jelas dan karena masyarakat tidak diberi pemahaman," ujar Fathan A Rasyid, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Fathan mengatakan, khusus di Kalbar, sosialisasi sudah dimulai sejak dua tahun lalu dari Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen Mabes TNI, menyebutkan, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat di Kalimantan seluas 6.403 hektare jika mengacu perjanjian Inggris-Belanda tahun 1891, 1915, dan 1928.

Pada lima wilayah yang mencakup 10 titik seluas 6.403 hektare itu, memang titik patok belum disepakati. Namun, sebagian besar wilayah sudah dihuni dan digarap oleh warga Malaysia hingga ke tapal batas yang ditentukan sepihak oleh negara jiran itu.

Di Pulau Sebatik, Kaltim, Malaysia mengklaim wilayah Indonesia seluas 103 hektare. Empat titik lainnya, berada di Kalbar, meliputi Tanjung Datuk, wilayah Indonesia yang diklaim 1.500 hektare, karena menyangkut pengertian watershed serta pelaksanaannya di lapangan. Di Sinapad diklaim 4.800 hektare, karena Malaysia menolak menganut pemahaman watershed, dan tetap bersikeras pada patok garis lurus.(Sinar Harapan)

E. HUKUM : **Tidak Ada**

F. OLAH RAGA : **Tidak Ada**

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. WOC Manado Targetkan Deklarasi Kelautan

PEMERINTAH akan menargetkan laut dan terumbu karang sebagai isu penting dunia dalam World Ocean Conference (WOC) di Manado, Mei datang. Hal itu akan diwujudkan dalam Manado Ocean Declaration (Deklarasi Kelautan Manado).

"Laut harus berperan mengurangi dampak perubahan iklim dan bisa menjadi isu dunia," kata Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenkokesra) Indroyono Soesilo dalam jumpa pers sosialisasi WOC di Jakarta, kemarin.

Berbicara dalam forum yang sama, peneliti dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Tony Wagey mengatakan, draf deklarasi kelautan Manado sudah pada tahap penyelesaian dan sedang disosialisasikan kepada 122 negara yang akan hadir dalam WOC 2009. "Secara garis besar draf tersebut berisi langkah dunia untuk mengoptimalkan fungsi laut dan terumbu karang dan membuat sebuah forum untuk mewadahi tujuan tersebut," katanya.

Konsep penerapan penyelamatan terumbu karang dunia juga menjadi agenda penting yang harus diketahui dunia. "Bahwa pengasaman air laut karena polusi udara bisa menyebabkan kematian bagi kehidupan terumbu karang, dasar dari rantau makanan yang menopang kehidupan laut dan bumi," katanya.

Laut dengan terumbu karangnya mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak ketimbang hutan dengan luas area yang sama. Bila hutan dengan kondisi yang baik hanya mampu menyerap CO2 satu gigaton, laut dengan terumbu karangnya mampu menyerap CO2 sebanyak dua gigaton.

"Karena itu, dunia melalui Global Environmental Facility (GEF) berkomitmen menghibahkan dana sebesar US\$250 juta kepada enam negara yang masuk dalam Coral Triangle Initiative (CTI): Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon," kata Sesmenkokesra.(Jurnal Nasional)

2. Jakarta 'most at risk' of climate change

Of all cities in Southeast Asia, Jakarta is the most vulnerable to the impacts of climate change, a study reveals.

The Singapore-based Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) ranked Central, North and West Jakarta at the top of a list of administrative regions prone to climate change, followed by Mondol Kiri province in Cambodia and East Jakarta.

The report, prepared by economists Arief Anshory Yusuf and Herminia A. Francisco, reveals Jakarta is vulnerable to all types of climate-change related disasters except for tropical storms.

"It is frequently exposed to regular flooding but most importantly, it is highly sensitive because it is among the most densely-populated regions in Southeast Asia," said the report released Wednesday.

Arief is an environmental economist at Padjadjaran University in Bandung.

The EEPSEA assessed Jakarta's history of exposure to five types of natural disaster — floods, landslides, drought, sea-level change and tropical storms — in the period from 1980 to 2000, along with those of 530 other areas in Southeast Asia.

The results were drawn up by considering each area's exposure to disasters and its ability to adapt to such threats, and comparing those findings with the vulnerability assessment framework of the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change.

Other vulnerable areas in Indonesia include West Sumatra and South Sumatra, the study says.

The study also reveals that all regions in the Philippines, Vietnam's Mekong River Delta, Cambodia, North and East Laos and Bangkok are vulnerable.

"The Philippines, unlike other countries in Southeast Asia, is not only exposed to tropical cyclones, but also many other climate-related hazards; especially floods, landslides and droughts," it said.

In Malaysia, the most vulnerable areas are the states of Kelantan and Sabah.

Thailand and Malaysia are the most capable of adapting to the impacts of climate change, according to the report.

"Overall, the areas with relatively high adaptive capacities are in Thailand, Malaysia and Vietnam whereas areas with relatively low adaptive capacities are mostly in Cambodia and Laos," the EEPSEA said.

The EEPSEA was established in 1993 to support research and training in environmental and economics studies. It is supported by the International Development Research Center, the Swedish International Development Cooperation Agency and the Canadian International Development Agency. (The Jakarta Post)

A study by the State Ministry for the Environment revealed earlier that flooding, combined with a rise in the level of the sea could permanently inundate parts of Greater Jakarta, including Soekarno-Hatta International Airport.

International activists have branded Indonesia the world's third biggest polluter after the United States and China, mostly due to widespread forest fires.

Developing nations, including Indonesia, have repeatedly called on rich nations to provide financial assistance to enable them to adapt to the impacts of climate change. (The Jakarta Post)

III. ARTIKEL

:

1. Indonesia, Malaysia need harmonized anti-timber smuggling procedures (by Eliswan Azly)

With many findings on illegal logging cases and smuggled timber trading on border areas shared by Indonesia and Malaysia, the two countries which share their cultural roots and beliefs need to harmonize their anti-timber smuggling procedures.

Due to the lack of harmonized procedures, Malaysia's commitment to combat illegal logging and timber trading across its borders with Indonesia is often not followed.

Illegal logging and timber trading were often found using many heavy equipment belonging to Malaysian bosses that had been confiscated in Indonesian forest areas close to border.

Timber smuggled into Malaysia from Indonesian forests was often legalized by Malaysian authorities, Forestry Minister MS Kaban said in a dialogue forum here on Wednesday.

Perhaps the timber illegally brought into Malaysia was covered by certain documents but Malaysian authorities never checked their authenticity, he said.

It was true that at the 17th meeting of the Indonesia-Malaysia General Border Commission, the two countries agreed to adopt permanent procedures on coordinated air patrols along their common border, the minister said.

However, the procedures only covered the number of personnel, frequency and location of the coordinated air patrols whereas Indonesia was concerned much about the transactions after the smuggled timber entered Malaysia's territory.

Furthermore, the minister said the air patrols were only aimed at monitoring security conditions along the Malaysia-Indonesian border region which are prone to illegal activities.

More saddening sometimes was that border guards often seemed to ignore what was happening right under their noses. "This is a ring of collaboration between smugglers and certain elements in the region," the minister said.

MS Kaban said Malaysian companies bought the Indonesian illegal timber to fuel their booming furniture industry. The smuggled timber was also often exported to China, Vietnam and other Asian countries through Malaysia.

The World Research Institute data show Indonesia had lost 72 percent of its forests, and according to some estimates, illegal logging has cost the Indonesian government more than \$US3.2 billion a year.

Kaban called on the Malaysian government to hand down harsh sentences to businessmen for buying timber illegally from Indonesia.

"Documents obtained by Indonesian police provided enough evidence on illegal timber shipments from Indonesia to a company in the Malaysian state of Sarawak," he said.

Kaban explained forestry criminal offences in Indonesia, notably in Kalimantan and Sumatra, as well as organized crime like a mafia network, involving people at the highest local level.

The forestry minister also called for closer cooperation between the Customs Office, Police and the Forestry Ministry to stamp out timber smuggling from Indonesia.

Last March, the Indonesian National Police intercepted 19 boats carrying 12,000 cubic metres of timber on Pawan River, in Ketapang, East Kalimantan, suspected of being smuggled into Malaysia.

"There needs to be sanctions against countries taking illegal timber from Indonesia. As long as the market is there, timber theft will always exist," he said, adding that more than 10 million cubic metres of timber had been smuggled into Malaysia each year according to data of 2006," he said.

The latest arrests have been hailed as a bold move, about which the environmental group WALHI Indonesia saying that up until now, the destruction of large parts of forests in Indonesia is the result of the lack of law enforcement.

WALHI said the forestry ministry talked more about sanctions than action, Rully Syumanda, a forestry campaigner with the group, said consequently illegal logging became out of control.

"The problem was also caused by the weakness of Indonesian government itself to prevent anything being dispatched to Malaysia by land or by sea," he said.

Furthermore, Syumanda said the flow of illegal timber from Kalimantan or Sumatra to other parts of Indonesia had declined in the past few years following a government crackdown on the areas.

But he said that was only temporary, and corruption allowed loggers to move more timber into the neighboring country.

"In some particular areas, the police or the minister dealing with this muzzling practice, for example in Saba or West Kalimantan, illegal loggers often bribed the military to enable them to move into Malaysia," Syumanda said.

MS Kaban said the government has adopted a tough stance against the smugglers in Indonesia, but the Malaysian government needed to do more in stopping the flow of illegal timber into its territory.

"The Malaysian market is so close to the Indonesian border, and usually the boats say they were trading timber locally when leaving, but then in the middle of the sea they changed course towards Malaysia...and then they took care of security personnel by Malaysian companies, and given some sort of protection," he said.

"In such operations, all involved will be investigated, including the port master who had permitted the boats to sail."

Earlier, a West Kalimantan newspaper quoted Malaysia's director of Sarawak forestry Datok Lan Talif Saleh as saying because the violation was committed in Indonesia, his country had no legal right to interfere, and would leave the handling of illegal loggers to Indonesia.

Datok Lan said Malaysia was committed to stamping out illegal logging, when it happened in Malaysia.

But Mr Kaban was calling for increased international support in the fight against illegal logging, urging Malaysia and others not to accept illegal timber or products they know came from Indonesia.

"Malaysia should be introspective, not just protect itself with the formal legalities of its institutions, stamping documents entering the country," he said.(ANTARA)

2. Regionalization versus globalization (by Osman Rzyttka)

Amid the world's worsening economic crisis, the Indonesian government needs to carefully plan the injection of scarce domestic capital. Lowering the minimum reserve requirement ratio of commercial banks is one possible option for boosting loan provisions for the real sector, including infrastructure and consumer-driven sectors.

Investments in ports, roads, railways, telecommunication and higher education would be a good way to lay the foundation for a favourable business environment.

The growth of regional economies has proved that a diversified, self-sufficient regional economy with the highest possible local content and distribution is more resistant to external shocks than large, mono-structured units, which produce mainly for export.

Mass-production has proven incapable of adjusting to changing environments and has come faced crises in most industrialized countries since the late 1970s.

The backbone of any well functioning economic region is vibrant small and medium sized enterprise and modern infrastructure, including access to the internet.

There are several alternatives the government could take to engineer economic growth.

Educational institutions including universities and vocational training centers can provide endogenous change.

In order to reduce risks however, endogenous development it is preferable to foster regional networks that provide innovation, know-how, capital and human. Ideally, this leads to the formation of production clusters that can efficiently respond and adjust to demand.

Regional centers of craftsmanship can function as the nucleus for such a development. By raising expenditures for research and development, through the promotion of spin-offs from universities for example, innovative environments, delivering new product ideas can be created.

The next step is to turn these ideas into manufactured goods in relatively low amounts, minimizing the risks (economies of scope).

The government can support the establishment of businesses through tax reductions, soft loans, and the provision of real estate and special tariffs for communal services such as waste disposal or water and sewerage.

Political and economic stability is a precondition for all of the above. Detailed assessments of the share of regional per capita income for consumption and how much is spent on imported goods can indicate possible fields of investments for Indonesian companies.

A general rule applies: The smaller the company, the more it should concentrate on niche segments of the market and deliver solutions with a high degree of services.

Strategic alliances can be of benefit to both partners by, for example, sharing expenditures for research and development or using each others distribution network. Marketing activities can be bundled and undertaken by co-operatives.

The foundation for a successful approach in vitalizing regional economies is sound regional management. Important to note is that this process needs to be institutionalized through the creation of regional planning offices that can conduct program management for tasks that are too big for local government units, such as the construction of sewerage plants and water works.

Project managers should be given authority over the communal level.

The transfer of soft loans could also be done by the regional planning office, as well as the issuance of bonds for financing regional infrastructure. If these options of raising and channelling development funds are chosen, the possibility of placing a member of the Corruption Eradication Commission (KPK) in this new agency could be considered. They could alternatively be placed at each level of the administrative echelon that deals with large sums.

Political legitimization needs to be obtained from the involved communities and the planning office should have a strong mandate from the central planning office in order to co-ordinate and implement the identified projects.

In the interest of swift progress, central law should dominate local law. The regional planning office could also serve as the contact point for potential investors and co-operatives and function

as a link between companies and communal administrations by integrating communal plans into a regional plan.

In order to enforce the regional plan vis à vis the local government units, the allocation of funds from the central government needs to be more harmonious.(The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN :

V. EDITORIAL :

1. Zimbabwe Semakin Runyam

Kondisi masyarakat Zimbabwe semakin runyam oleh kelangkaan pangan dan wabah penyakit di tengah bahaya kehancuran ekonomi.

Lebih memprihatinkan lagi, Presiden Robert Mugabe dan elite politik Zimbabwe lainnya seakan tidak peduli. Terkesan mereka lebih asyik dengan urusan kepentingan politik ketimbang memerhatikan masyarakat yang terimpit penderitaan.

Tarik-menarik kekuasaan antara Mugabe dan pesaingnya, Morgan Tsvangirai, telah menimbulkan ketegangan berkepanjangan karena gagal mencapai kompromi atas rencana pembagian kekuasaan. Pertarungan kekuasaan di kalangan elite itu benar-benar berjalan terpisah dengan kepentingan masyarakat yang terus bergulat dengan kelaparan, kelangkaan air bersih, dan penyakit.

Harga-harga terus melambung tinggi dengan tingkat inflasi mencapai ratusan juta persen. Daya beli masyarakat terus melemah di tengah situasi ekonomi yang ambruk. Kualitas kehidupan secara keseluruhan memang menurun drastis seperti terlihat pada merebaknya wabah kolera, yang menewaskan hampir 3.000 orang belakangan ini. Puluhan ribu penderita lainnya terancam bahaya, sementara hampir 50 persen dari 13 juta penduduk mengalami kelangkaan pangan.

Bahaya kelaparan pangan dan memburuknya sistem sanitasi sedang mengancam Zimbabwe, yang merdeka tahun 1980. Padahal, sampai pada awal era kemerdekaan, Zimbabwe dikenal sebagai salah satu pengeksport pangan Afrika. Posisi Zimbabwe sebagai pengeksport pangan mulai kedodoran sejak ladang-ladang pertanian, yang diambil alih dari kaum putih akhir tahun 1990-an, ditelantarkan petani kulit hitam.

Persoalan dalam bidang ekonomi kemudian cepat memburuk karena tumpang tindih dengan kekacauan bidang politik. Presiden Mugabe yang berkuasa sejak Zimbabwe merdeka tahun 1980 ingin melanggengkan kekuasaan melalui cara represif dan tidak demokratis. Metode represif itu semula efektif, tetapi kemudian mendapat tantangan keras oleh gerakan pembangkangan sipil di tengah arus perubahan.

Kehancuran ekonomi dan kekacauan politik Zimbabwe tidak terlepas dari kepemimpinan Mugabe yang tidak efektif lagi setelah tanpa henti berkuasa sejak merdeka 29 tahun lalu. Setelah lama berkuasa, Mugabe (85) sama sekali tidak menyiapkan calon penggantinya, tetapi justru berusaha keras mempertahankan kekuasaan dengan pelbagai cara.

Upaya menjaga dan mempertahankan kekuasaan Presiden Mugabe yang sudah uzur itu begitu menyedot perhatian dan energi, membuat program pembangunan dalam bidang ekonomi telantar.(Kompas)

2. Optimisme Investasi di Awang-Awang

TAHUN ini diperkirakan tahun yang buruk bagi penanaman modal langsung asing di negara berkembang. Buruk, bahkan sangat buruk, karena foreign direct investment (FDI) bakal anjlok 31%.

Prediksi yang memprihatinkan itu dilontarkan Bank Dunia. Salah satu lembaga donor multilateral itu memperkirakan jumlah FDI yang masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia, tahun ini hanya US\$400 miliar atau turun US\$180 miliar jika dibandingkan dengan FDI tahun lalu yang mencapai US\$580 miliar.

Hal itu membuat pukulan krisis ekonomi yang dirasakan negara-negara emerging markets semakin telak. Lebih-lebih setelah ekspor dari negara-negara berkembang juga diprediksi turun hingga 20% akibat krisis.

Padahal, dalam kurun beberapa tahun terakhir investasi asing langsung menyumbang sekitar 38% terhadap arus dana yang masuk ke negara berkembang. Tekanan akan semakin berat karena, menurut Manajer Keuangan Internasional Bank Dunia Mansoor Dailami, penurunan FDI tersebut akan kian menekan nilai tukar mata uang negara berkembang.

Sejauh ini, dampak penurunan FDI terhadap perekonomian Indonesia memang belum begitu terasa. Bahkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal masih optimistis target investasi asing di Indonesia tahun ini bisa dicapai.

Sebuah bangsa tentu saja memerlukan optimisme. Persoalannya ialah apakah optimisme itu berpijak pada realitas atau tidak. Optimisme yang berlebihan, yang terlalu mengawang-awang, justru akan membuat penderitaan bangsa ini semakin hebat ketika jatuh.

Lebih-lebih lagi, hingga detik ini negeri ini belum berbuat banyak untuk menggairahkan investasi asing langsung. Yang terjadi justru sebaliknya, banyak persoalan belum disingkirkan untuk menjadikan investasi asing nyaman di negeri ini.

Rantai birokrasi yang mencekik, hukum yang tidak pasti, hingga keamanan yang tidak terjamin, seolah menjadi merek dagang Indonesia. Akibatnya, investor berpikir berkali-kali untuk menginvestasikan dana mereka secara langsung di Republik ini.

Kita perlu mengingat sejarah krisis ekonomi pada 1998. Itulah tahun ketika tragedi perekonomian meremukkan sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik bangsa. Keadaan ketika itu berlangsung sangat tragis dan boleh jadi tercatat sebagai periode suram dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Bayangkan, hanya dalam kurun setahun, perubahan sangat dramatis terjadi. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade habis begitu saja. Gambaran indah menyongsong masa depan sirna. Sedemikian pahitnya, hingga kini imbas krisis 1998 tersebut belum sepenuhnya pulih. Padahal, waktu itu optimisme bahwa kita bakal bisa keluar dari krisis dalam waktu singkat juga bergelora dan digelorakan.

Dengan berangkat dari sejarah kelam tersebut, sudah seharusnya para pemangku kepentingan di negeri ini lebih memilih waspada menyikapi peringatan itu daripada optimisme yang berlebihan. Sebab segala prediksi ekonomi tidak serta-merta keluar secara ajaib. Ia harus diasumsikan telah melampaui kajian matang oleh mereka yang kompeten, apalagi yang dikeluarkan sebuah lembaga dunia seperti World Bank.

Lebih baik waspada lalu berjaga-jaga daripada menghibur diri tapi setelah itu mampus.(Media Indonesia)

Jakarta, 23 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu

